

DIES NATALIS XV FTI 2008

**“IKLIM INVESTASI
INDUSTRI MANUFAKTUR
DI INDONESIA”**



Oleh :
Y. M. Kinley Aritonang, Ph.D.

Bandung, 30 April 2008

DIES NATALIS XV FTI 2008

**”IKLIM INVESTASI
INDUSTRI MANUFAKTUR
DI INDONESIA”**



Oleh :
Y. M. Kinley Aritonang, Ph.D.

DARTAR ISI

IKLIM INVESTASI INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA.....	1
I. PENDAHULUAN.....	1
II. HAMBATAN BERINVESTASI YANG DIALAMI DI INDONESIA.....	4
II.1 Upah Makin Mahal.....	5
II.2 Perpajakan Sulit dan Rumit.....	6
II.3. Kesulitan & Rumitnya Prosedur Perdagangan.....	7
II.4. Kondisi infrastruktur buruk.....	9
II.5 Korupsi.....	11
III. IKLIM INVESTASI INDUSTRI MANUFAKTUR	11
IV. PENUTUP.....	20
DAFTAR PUSAKA.....	25

IKLIM INVESTASI INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA

Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan YME yang sampai saat ini masih membimbing dan memberkati kita sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk merayakan Ulah FTI yang ke XV. Pada saat ini marilah kita memusatkan perhatian kita meninjau suatu keadaan yang terjadi di negara kita yang tercinta, suatu keadaan yang mungkin jarang kita perbincangkan dan pelajari dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari, yaitu Iklim Investasi Industri Manufaktur di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Pertama-tama marilah kita melihat kondisi iklim investasi di Indonesia secara umum. Kondisi umum ini terjadi hampir di segala sektor ekonomi Indonesia, termasuk sektor industri manufaktur.

Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembangan dan risiko suatu investasi (Stern, 2002). Iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Iklim investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan risiko serendah mungkin, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin.

Setelah krisis ekonomi tahun 1998, ekonomi Indonesia sudah mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun, tetapi pertumbuhan ini masih lambat jika dibandingkan dengan negara-negara yang mengalami krisis ekonomi yang sama, seperti Korea Selatan dan Thailand. Bahkan pertumbuhan ini masih jauh jika dibandingkan dengan pertumbuhan yang dialami pada Orde Baru (ORBA), khusus pada tahun 1980-an dan 1990-an.

Sudah diketahui secara umum bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia adalah adanya kegiatan investasi pada kegiatan bisnis, baik investasi dari luar negeri (PMA) atau investasi dari dalam

negeri (PMDN). Investasi ini dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan merupakan salah satu sumber devisa. Indonesia tidak memiliki solusi lain untuk membuka lapangan kerja selain investasi, sehingga hanya dengan membuat iklim investasi yang kondusif, para investor, baik dari dalam dan luar negeri, memiliki keberanian untuk menanam modalnya.

Sudah beberapa kali dinyatakan oleh Bank Dunia bahwa iklim investasi di Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Pada saat ini, Indonesia bukan lagi menjadi tujuan utama para investor asing, bahkan mereka berpendapat kalau bisa menghindari negeri ini.

Sudah banyak penelitian dan kajian yang telah dilakukan untuk mengetahui penyebab iklim investasi Indonesia yang buruk. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan iklim investasi yang buruk ini, bahkan ada dari beberapa faktor tersebut yang saling berinteraksi membentuk sebuah pola yang lebih kompleks. Faktor-faktor ini sudah sering diungkapkan di media, seperti tidak adanya kepastian hukum, keamanan, infrastruktur yang buruk, hingga kondisi perburuhan yang tidak baik. Sebagai contoh: menurut Dadan Kuswaraharja (2006), PMDN dan PMA untuk periode 1 Januari hingga 30 November 2006 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2005. Dalam 11 bulan, dari sisi jumlah proyek PMA turun 3,61% namun dari sisi nilai investasi turun 45,91%. Dari sisi jumlah proyek PMDN turun 24,48% tetapi dari sisi nilai investasi PMDN turun 37,14%. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah kenaikan BBM pada tahun 2005 yang menyebabkan kenaikan nilai investasi dan biaya produksi, krisis listrik yang terjadi di 10 wilayah yang mengakibatkan tidak mencukupinya energi listrik untuk menggerakkan investasi swasta, krisis gas di Jawa Barat dan Jawa Timur yang mengakibatkan penundaan ekspansi kegiatan penanaman modal, masalah perburuhan, harmonisasi tarif pajak, dll.

Tabel 1 berikut menjelaskan gambaran arus neto (arus investasi masuk – arus investasi keluar) untuk perioda 1990 sampai 2004 di Indonesia. Lebih besar arus PMA keluar daripada masuk mencerminkan buruknya iklim investasi di Indonesia, terutama pada elektronik, tekstil, dan pakaian jadi.

Tabel 1. Nilai Neto Arus PMA di Indonesia (juta dollar USA)

Tahun	Nilai
1990	1.093
1991	1.482
1992	1.777
1993	2.004
1994	2.109
1995	4.346
1996	6.194
1997	4.667
1998	-356
1999	-2.745
2000	-4.550
2001	-2.978
2002	145
2003	-597
2004	423

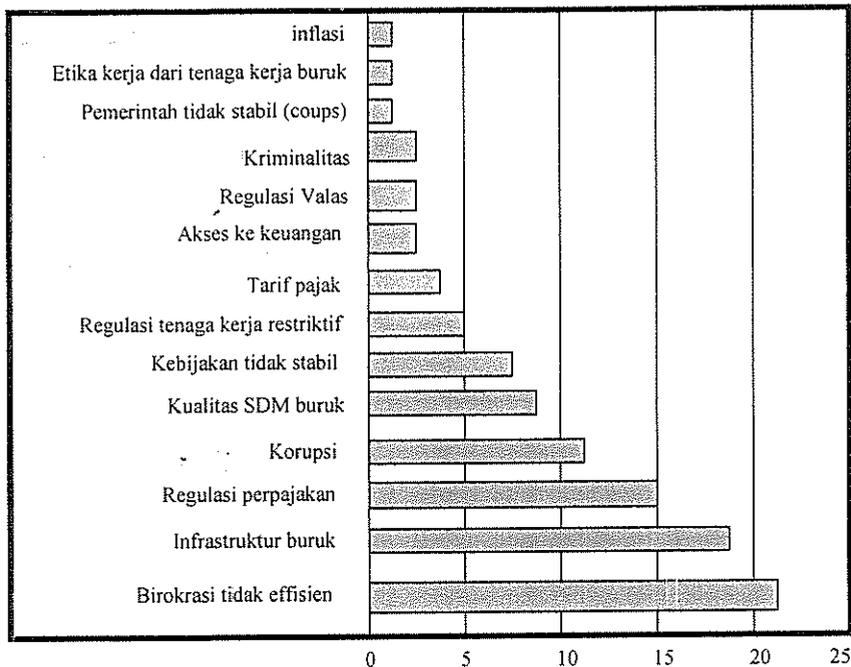
Catatan : Arus masuk PMA termasuk privatisasi BUMN kepada pihak asing, dan restrukturisasi perbankan, terutama penjualan aset-aset bank ke investor asing.

Sumber: Bank Indonesia: *Indonesian Financial Statistics*, beberapa terbitan berturut-turut sampai Februari 2005

Bila perkembangan PMA di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti negara kelompok ASEAN, Indonesia adalah satu-satunya yang mengalami arus PMA negatif sejak krisis ekonomi tahun 1998, walaupun nilai negatifnya condong mengecil sejak tahun 2000 (disebabkan iklim investasi yang relatif membaik).

Bank Dunia dalam satu laporannya menjelaskan bahwa iklim investasi di sebuah negara dipengaruhi oleh empat faktor utama, diantaranya adalah stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi. Hasil survey yang dilakukan oleh *The world Economic Forum (WEF)* melaporkan pada laporan tahunannya, *The Global Competitiveness Report*, menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang menjadi peringkat paling atas sebagai penghambat bisnis, yaitu birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk, dan regulasi perpajakan, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 1. Faktor-faktor Penghambat Bisnis Dalam *The Global Competitive Report 2005-2006*



Sumber : WEF 2005 (dikutip dari Tulus Tambunan, 2006)

Pada laporan itu dinyatakan bahwa negara Finlandia menempati posisi pertama sebagai negara yang paling *competitive* diikuti oleh Amerika Serikat, Swedia, Denmark, Taiwan, Singapura, dst. Pada tahun 2007-2008 Amerika Serikat menempati peringkat pertama, diikuti oleh Switzerland, Denmark, Swedia, Finlandia, dan Singapura.

II. HAMBATAN BERINVESTASI YANG DIALAMI DI INDONESIA

Tabel berikut adalah problem utama yang dihadapi investor dalam berinvestasi untuk negara Thailand (Th), Malaysia (M), Singapura (S), Indonesia (ID), Filipina (F), Vietnam (V), dan India (In). Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia hampir seluruhnya menempati posisi terburuk untuk hal yang diperhatikan. Untuk Indonesia problem upah makin mahal menempati posisi

pertama, disusul dengan sistem perpajakan yang sulit dan rumit, kebijakan tidak jelas & tidak pasti, kesulitan dan rumitnya prosedur perdagangan, kondisi infra struktur buruk, dan isu tenaga kerja.

Negara Malaysia dan Singapura memiliki permasalahan yang sama, yaitu upah makin mahal. Kesulitan & rumitnya prosedur perdagangan menempati posisi pertama pada negara Thailand.

Tabel 2. Problem Utama Dalam Berinvestasi (%)

Problem	Th	M	S	ID	F	V	In
Kondisi infrastruktur buruk	15,6	23,6	3,1	54,7	75,7	63,8	72,2
Kebijakan tidak jelas & tidak pasti	9,5	16,5	6,3	67,7	47,9	61,3	14,8
Perpajakan sulit dan rumit	46,3	11,0	12,5	72,0	20,9	40,0	55,6
Kesulitan & rumitnya prosedur perdagangan	62,8	33,9	21,4	67,6	37,1	56,8	58,5
Upah makin mahal	41,6	52,1	54,0	86,4	36,5	29,5	55,7
Isu tenaga kerja/buruh (seperti demonstrasi, dll)	7,1	6,6	1,1	37	25,7	11,5	26,6

Sumber: Jetro (dikutip dari Kompas, 2006)

II.1 Upah Makin Mahal

Pada tahun 1980an Indonesia memiliki daya saing yang baik dibandingkan negara tetangga karena memiliki tingkat upah yang rendah, tetapi daya saing ini tidak dapat dipertahankan atau menurun apalagi seiring dengan diberlakukannya kebijakan penetapan upah minimum regional (UMR), dan keadaan ini diperburuk lagi dengan adanya pelaksanaan desentralisasi. Survey yang dilakukan IPEM (dikutip dari Tulus Tambunan, 2006) menunjukkan bahwa biaya untuk mengatasi masalah tenaga kerja mencapai 5% dari biaya produksi tahunan. Kualitas tenaga kerja, penguasaan teknologi termasuk didalam isu ini. Dari sekitar 600 responden, 12,6% menyatakan mengalami perselisihan dalam menentukan upah, 5,8% mengalami masalah dengan jaminan sosial tenaga kerja, dan 8,4 % mengalami masalah dengan serikat buruh (ISEI, 2006).

Menurut survey yang dilakukan oleh LPEM FEUI, mahalnya biaya untuk mem-PHK pekerja dari jumlah yang dibutuhkan semakin mahal. Sebagai contoh,

biaya yang dikeluarkan untuk mem-PHK pekerja yang telah bekerja selama 5 tahun (diukur dalam gaji/upah bulanan) adalah 6 bulan gaji ditambah 2 bulan balas jasa, seperti yang ditetapkan dalam peraturan. Permasalahan umum adalah tuntutan kenaikan gaji.

II.2 Perpajakan Sulit dan Rumit

Hasil survey yang dilakukan oleh LPEM FEUI mengidentifikasi bahwa restitusi pajak masih merupakan sumber terjadinya korupsi. Diperlukan rata-rata 5 bulan untuk mendapatkan restitusi pajak dan jumlah yang dibayarkan kembali hanya 87% dari yang diajukan. Responden (sekitar 57%) mengatakan bahwa mereka harus bernegosiasi dengan petugas pajak atau harus membayar biaya tambahan untuk mendapatkan restitusi pajak. Para pelaku bisnis mengatakan bahwa system pelaporan pajak rumit dan memakan waktu. Perusahaan rata-rata membutuhkan 45 hari-orang perbulan untuk mengisi laporan pajak.

Pelaksanaan desentralisasi juga telah membuat masalah pajak menjadi masalah penting. Sekitar setengah perusahaan yang besar dan eksportir, yang disurvei, mengatakan adanya pertambahan pajak daerah menjadikan hambatan baru bagi dunia bisnis. Sekitar 77% perusahaan yang disurvei mengeluh atas ketidakjelasan dalam pelaksanaan pajak, dan sekitar 73% mengeluh karena tingginya pajak.

Pemerintah mengeluarkan UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ternyata Undang-Undang ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi iklim investasi di dalam negeri. Disini BPK berkeinginan melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, Layanan, Sistem Moneter dan Fiskal, Hariyadi B Sukamdani, menilai data wajib pajak merupakan rahasia yang harus dijamin Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. "Yang kita khawatirkan, kalau BPK punya akses dan bila kemudian terdapat ketidaksesuaian data antara BPK dan Ditjen Pajak, SPT kami bisa dimentahkan. Ini tentu akan membawa konsekuensi serius bagi kepastian yang berdampak biaya tinggi," ujar Hariyadi. Menyoroti hal ini, Hariyadi menilai hal

tersebut terjadi karena terjadinya miskomunikasi antara BPK dan Ditjen Pajak. Seharusnya, masalah ini diselesaikan BPK dan Ditjen Pajak dengan koordinasi yang baik tanpa merugikan wajib pajak. Menurut Hariyadi, Kadin berharap BPK mau menjalankan UU KUP tersebut.

II.3. Kesulitan & Rumitnya Prosedur Perdagangan

Survey LPEM FEUI di tahun 2005 menunjukkan adanya penurunan biaya informal yang harus dibayar dari sekitar 10,8% di tahun 2001 menjadi 6,4% di tahun 2005. Tetapi kenyataan dilapangan untuk pemain baru dalam bisnis harus mengeluarkan *entry cost* yang tinggi, sekitar 9% dari modal awal.

Memulai Bisnis

Kesulitan dan mahalnya untuk memulai bisnis di Indonesia memang merupakan salah satu faktor penyebab memburuknya iklim investasi Indonesia. LPEM FEUI telah membuat sebuah tabel yang menunjukkan jumlah prosedur, jumlah hari untuk mengurus perizinan usaha, besarnya biaya, dan modal minimum yang diperlukan dalam memulai usaha baru.

Tabel 3. Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis di Beberapa Negara

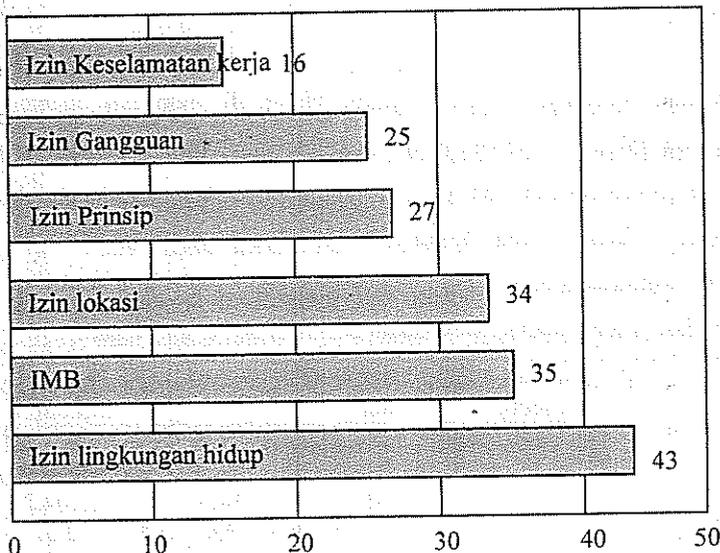
Negara	Jumlah Prosedur	Jumlah Hari	Biaya*	Modal Minimum
Bangladesh	8	35	91,0	0,0
Kamboja	11	94	480,1	394,0
China	12	41	14,5	1.104,2
Hongkong	5	11	3,4	0,0
India	11	89	49,5	0,0
<u>Indonesia</u>	<u>12</u>	<u>151</u>	<u>130,7</u>	<u>125,6</u>
Korea Selatan	12	22	17,7	332,0
Laos	9	198	18,5	28,5
<u>Malaysia</u>	<u>9</u>	<u>30</u>	<u>25,1</u>	<u>0,0</u>
<u>Filipina</u>	<u>11</u>	<u>50</u>	<u>19,5</u>	<u>2,2</u>
<u>Singapura</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>1,2</u>	<u>0,0</u>
Sri Langka	8	50	10,7	0,0
Taiwan	8	48	6,3	224,7
<u>Thailand</u>	<u>8</u>	<u>33</u>	<u>6,7</u>	<u>0,0</u>
<u>Vietnam</u>	<u>11</u>	<u>56</u>	<u>28,6</u>	<u>0,0</u>

Catatan : * = sebagai % dari pendapatan perkapita

Sumber: World Bank (2005), dikutip dari Tulus Tambunan (2006)

Gambar 3 menjelaskan jumlah izin dan jumlah hari yang dibutuhkan dalam memulai usaha di Indonesia. Dari gambar tersebut dapat dilihat betapa buruknya kualitas kelembagaan publik di Indonesia. Pada tabel 4 dapat dilihat keburukan kelembagaan publik Indonesia yang diambil dari laporan tahunan WEF. Hampir pada seluruh indikator pada tabel tersebut menunjukkan penurunan tingkat, yang berarti keadaannya bertambah buruk, dari tahun 2004-2005 ke tahun 2005-2006. Hanya indikator tingkat birokrasi yang relatif mengalami perbaikan.

Gambar 3. Jumlah Hari Mendapatkan Izin di Indonesia



Sumber : Kadin Indonesia-Jetro, 2006

Kira-kira dibutuhkan 50 hari kalender (36 hari kerja) untuk mendapatkan Surat Persetujuan (SP) dari BKPM, dimana waktu resminya adalah 10 hari kerja. Selisih yang cukup besar ini menggambarkan adanya hal-hal yang tidak terencana dan tidak transparan dalam proses persetujuan tersebut.

Para investor harus sering bertanya dan memeriksa dokumen mereka ke BKPM jika masih ada dokumen tambahan yang perlu diselesaikan. Survey ini

mengidentifikasi bahwa secara rata-rata aplikasi investor ditolak sebanyak dua kali sebelum dinyatakan selesai.

Tabel 4. Posisi Indonesia Untuk Beberapa Indikator Kelembagaan Publik dalam *The Global Competitiveness Report 2004-2005 and 2005-2006*

	Peringkat	
	2004-2005 (104 negara)	2005-2006 (117 negara)
Kemandirian Judisial	58	68
Efisiensi dari kerangka kerja legal	51	73
Hak property	67	88
Perlindungan kekayaan intelektual	47	68
Pemborosan dalam pengeluaran pemerintah	25	40
Beban dari regulasi pemerintah pusat	15	45
Tingkat birokrasi	85	48
Tingkat dan efek dari perpajakan	27	24
Pembayaran tidak regular/illegal dalam ekspor dan impor	75	106
Pembayaran tidak regular/illegal dalam pemakaian utilitas lic	70	94
Pembayaran tidak regular/illegal dalam pembayaran pajak	76	104
Pembayaran tidak regular/illegal dalam kontrak public	46	84
Pembayaran tidak regular/illegal dalam keputusan judisial	69	99

II.4. Kondisi Infrastruktur Buruk

Kondisi infrastruktur ternyata juga memperburuk kondisi investasi di Indonesia. Tidak hanya dalam kuantitas yang terbatas tetapi juga dalam kualitas yang buruk dari infrastruktur yang sudah ada, khusus jalan raya. Kombinasi dari kedua aspek ini benar-benar sangat menghambat kelancaran produksi dan perdagangan yang selanjutnya menambah beban biaya bagi perusahaan-perusahaan. Tabel 5 menunjukkan posisi Indonesia untuk kualitas infrastruktur.

Tabel 5. Posisi Indonesia Untuk Kualitas Infrastruktur Dalam The Global Competitiveness Report 2004-2005 dan 2005-2006

Indikator	Peringkat	
	2004-2005	2005-2006
Kualitas keseluruhan	44	66
Pembangunan jalan raya	28	52
Kualitas pelabuhan	40	71
Kualitas transpor udara	61	70
Suplai listrik	68	84
Efisiensi kantor pos	57	69
Kualitas telepon/fax	55	90
Jaringan telepon per 1000 penduduk	58	96

Sumber: WEF (2004, 2005) dikutip dari Tulus Tambunan (2006)

Untuk yang lainnya, survey LPEM FEUI menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan membutuhkan 24 hari kerja untuk mendapatkan sambungan listrik PLN, 16 hari sambungan telekomunikasi, dan 17 hari untuk sambungan air bersih PDAM. Gangguan listrik mati secara rata-rata adalah 19 kali dalam 6 bulan, sementara penurunan tegangan listrik sebanyak 38 kali. Secara rata-rata listrik mati terjadi selama 124 menit untuk sekali mati. Frekuensi gangguan telepon secara rata-rata terjadi 9 kali selama 6 bulan terakhir sebelum survey. Sedangkan masalah kualitas air bersih PDAM secara rata-rata terjadi 29 kali dalam 6 bulan, mulai dari bau, warna sampai gangguan kelancaran air. Tabel berikut menunjukkan kinerja infrastruktur di Asean dan peringkat Indonesia.

Tabel 6. Kinerja Infrastruktur di ASEAN

Indikator	Peringkat Indonesia
Tingkat elektrifikasi (%)	11 dari 12 negara
Jaringan telepon tetap (%)	12 dari 12 negara
Jumlah pemohon mobile phone (%)	9 dari 12 negara
Akses ke sanitasi yang baik (%)	7 dari 11 negara
Akses ke air bersih (%)	7 dari 11 negara
Jaringan jalan raya (km per 1000 penduduk)	8 dari 12 negara

Sumber: World Bank (2005), dikutip dari Tulus Tambunan (2006)

II.5 Korupsi

Hambatan korupsi sangat dirasakan oleh kalangan pengusaha. Korupsi yang dilakukan oleh aparat pusat dan daerah masing-masing mencapai hampir 5% dari total penjualan. Manajemen perusahaan harus menggunakan waktunya kira-kira 5% sampai 6% untuk berurusan dengan aparat pusat dan daerah. Bahkan ada kecenderungan dibuat peraturan yang berlebihan untuk meningkatkan biaya dan mendorong timbulnya korupsi. Hasil studi menunjukkan bahwa 38% dari perusahaan yang ada menganggap masalah korupsi sudah sangat serius melebihi keadaan di RRC dan Filipina. Pengumpulan pajak juga tidak efisien karena korupsi. Korupsi semakin memburuk sejak pelaksanaan desentralisasi. Sebelumnya perusahaan tahu berapa besar dan kepada siapa jumlah tertentu harus dibayarkan agar urusan lancar. Sekarang semua serba tidak jelas, sementara urusan juga belum tentu terjamin akan lancar. Tabel berikut menunjukkan urutan negara yang terkorup diantara negara-negara ASEAN.

Tabel 7. Indeks Persepsi Korupsi

Negara	1996	2000	2001	2002	2003	2003 urutan (133 negara)
Malaysia	5,3	4,8	5,0	4,9	5,2	37
Thailand	3,3	3,2	3,2	3,2	3,3	70
Filipina	2,7	2,8	2,8	2,6	2,5	92
Indonesia	2,7	1,7	1,7	1,9	1,9	122

Catatan : Indeks persepsi korupsi berkaitan dengan tingkat persepsi atas korupsi berdasarkan pendapat kalangan bisnis, akademik, dan analisis tentang risiko. Nilai indeks antara 10 (sangat bersih) dan 0 (sangat korup)

Sumber : Transparency International , dikutip dari *Economic and research development, Development indicators and policy research division.*

III. IKLIM INVESTASI INDUSTRI MANUFAKTUR

Alam investasi industri manufakturpun mengalami kemunduran sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Semenjak krisis tersebut pertumbuhan sektor manufaktur nasional cenderung melemah. Hal ini bisa disimak dari angka pertumbuhan yang hanya berkisar antara 3 sampai 5 persen per tahun sejak tahun

2000. Angka ini jauh lebih kecil dari angka pertumbuhan rata-rata sebesar lebih dari 10 persen per tahun pada masa sebelum krisis dari tahun 1970 hingga 1996. Melemahnya pertumbuhan sektor manufaktur ini disebabkan hal-hal berikut (D.S.I.F. 2007):

- A. Adanya kendala pertumbuhan permintaan, baik domestik maupun internasional. Dari sisi domestik, pertumbuhan permintaan untuk barang-barang industri baru saja perlahan bangkit setelah sempat tertekan saat krisis ekonomi. Dari sisi internasional, ekspor manufaktur Indonesia mengalami persaingan yang semakin sengit dengan negara China, Vietnam, dan Myanmar yang semuanya sama-sama mengandalkan upah buruh murah.
- B. Alasan lain yang menghambat pertumbuhan manufaktur adalah kapasitas yang terpasang masih tinggi. Banyak perusahaan masih beroperasi menggunakan kapasitas pada era sebelum krisis. Tingginya kapasitas di unit-unit produksi manufaktur sebelum krisis terlihat dari rendahnya penggunaan kapasitas pada saat itu dimana rata-rata perusahaan hanya menggunakan sekitar 60% sampai dengan 70% kapasitas yang ada. Kapasitas ini hanya akan diperluas bila tingkat permintaan meningkat.
- C. Secara agregat nasional, tingkat pertumbuhan investasi pada sektor manufaktur masih dibawah tingkat pertumbuhan yang ada sebelum krisis. Hal ini disebabkan oleh masih tersedianya kapasitas peningkatan produksi pada banyak perusahaan, sehingga sedikit yang mengambil inisiatif mengembangkan kapasitas produksi yang ada melalui investasi.
- D. Lemahnya fungsi perbankan. Tingkat pertumbuhan kredit perbankan sampai tahun 2006 masih di bawah tingkat yang diharapkan, sebesar 20% per tahun. Kenyataannya pertumbuhan ini lebih banyak disumbang dari pertumbuhan kredit konsumtif, bukan kredit investasi atau modal kerja.
- E. Masalah buruh. Iklim ketenagakerjaan saat ini membuat perusahaan harus berpikir bila hendak memperkerjakan tambahan buruh. Hal ini disebabkan mahalnya ongkos berupa uang pesangon yang harus ditanggung perusahaan

E. Konsentrasi manufaktur yang tinggi. Sampai saat ini tingkat konsentrasi empat perusahaan (CR4) pada sektor manufaktur masih berkisar antara 50% sampai dengan 60%, yang berarti terpusatnya pembentukan keluaran hanya pada empat perusahaan terbesar. Akibat jangka pendek dari tingkat manufaktur yang tinggi dapat menyebabkan cepat memanasnya mesin perekonomian yang kemudian mengakibatkan mudahnya terpicu inflasi. Hal ini dapat mengakibatkan adanya ketergantungan harga dan produksi pada kapasitas segelintir perusahaan. Sebagai akibat jangka panjang adalah struktur yang tidak kompetitif menyebabkan sulit masuknya pemain atau investasi baru, yang berakibat sulitnya menambah kapasitas produksi jangka panjang.

Menurut Jusuf Waluyo Jati (2007) terdapat sejumlah pengusaha yang bersikap pesimis atas pertumbuhan investasi sektor manufaktur pada tahun 2008. Tercatat bahwa pada tahun 2006 investasi di sektor manufaktur mencapai US \$5,98 miliar dan pertumbuhan ini akan mengalami penurunan sekitar 20% untuk tahun 2008. Rasa pesimis ini dapat dimengerti disebabkan adanya perlambatan perekonomian global dan lonjakan harga minyak mentah dunia yang secara langsung dapat menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini menjadi lebih parah dengan adanya kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada industri manufaktur nasional sehingga kian memperlemah kinerja produksi dan perdagangan sektor manufaktur ini. Kenaikan harga BBM yang dilakukan Pertamina juga memperburuk kondisi ini. Dalam situasi yang demikian, para pengusaha terpaksa menaikkan harga jual produk atau terpaksa memotong margin keuntungan agar dapat menjaga daya beli konsumen yang saat ini masih relatif rendah.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), terdapat lima sektor manufaktur yang berkontribusi tidak optimal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat pada kuartal III/2007. Sektor-sektor tersebut adalah :

- Sektor tekstil kulit dan alas kaki. Sektor ini mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,4%.

- Sektor makanan dan minuman dan tembakau tercatat hanya 3,6%
- Sektor industri pengolahan hasil hutan mengalami pertumbuhan -1,1%.
- Sektor pupuk kimia dan barang karet hanya 1,9%
- Sektor industri baja hanya 2,3%

Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi memastikan investasi di industri manufaktur akan melambat, apalagi jika pemerintah tidak segera memperbaiki iklim investasi dengan merevisi sejumlah peraturan, khusus UU ketenagakerjaan. "Perlambatan arus investasi itu sudah pasti terjadi. Tanpa kenaikan harga minyak mentah dunia saja aliran investasi baru semakin jarang" kata Sofyan. Sementara itu, ketua umum gabungan industri pengerjaan mesin dan logam (Gamma) Achmad Safiun memperkirakan perlambatan investasi juga akan terjadi di sektor industri barang modal. Bahkan diprediksi investasi di sektor ini pada tahun depan akan menurun 20% - 30%. Untuk menjaga agar arus investasi baru pada tahun depan tidak semakin merosot, katanya, pemerintah perlu mempersiapkan langkah terobosan untuk bisa menjamin pasokan BBM, listrik ke sektor-sektor lahap energi. "Tetapi saya rasa pada 2008 kegiatan industri memang semakin suram, yang hangat justru kegiatan kampanye (pemilu)" katanya. Kebalikannya, ketua umum gabungan pengusaha makanan dan minuman seluruh Indonesia, Thomas Darmawan mengaku tetap optimis bahwa investasi di sektor ini pada tahun 2008 tetap tumbuh dibandingkan dengan tahun 2007 yang diperkirakan 7 miliar US. "Industri makanan dan minuman tetap akan tumbuh bahkan bisa lebih besar lagi"

Kekuatiran ini juga muncul dikalangan penguasa dan anggota DPR (Jusuf Waluyo Jati, 2008). Mereka mengkuatirkan bahwa iklim bisnis dan investasi (termasuk investasi di sektor manufaktur) semakin tidak pasti menyusul adanya aksi pemanasan aktivitas politik di kalangan elit kekuasaan menjelang pemilu 2009. Permasalahan-permasalahan eksternal dan internal sektor manufaktur dikuatirkan tak mampu diselesaikan dengan baik yang berakhir dengan penurunan pertumbuhan industri pada tahun 2008.

Ketua umum APINDO, Sofyan, kembali mengatakan " diawal tahun, industri manufaktur biasanya bertumbuh lambat. Ini sangat berbahaya jika pada awal tahun saja industri sudah ditelantarkan pemerintah. Kondisi itu akan berdampak buruk pada pertambahan jumlah pengangguran dan gejolak sosial. Presiden SBY mengingatkan para menteri untuk dapat mencegah terjadinya gejolak ekonomi selama 2008 terkait dengan pemanasan politik menjelang pemilu 2009. "Tetapi saya sangsi isyarat pak SBY itu akan efektif menahan para menterinya untuk tidak melakukan aktivitas politik" katanya. Pada awal 2008 industri manufaktur sudah dihantam oleh kenaikan harga gas yang akan membuat PGN kembali ber-ancang2 menetapkan skala harga gas baru bagi industri. Keadaan ini menjadi lebih parah lagi dengan kenaikan harga minyak mentah dunia yang telah menembus harga US \$100 per barrel. Sektor industri lahab BBM akan berpikir dua kali jika ingin melakukan ekspansi.

Pertumbuhan industri manufaktur mencemaskan bila tidak ada konsolidasi dari kebijakan pemerintah untuk mendukung bertahan dan berkembangnya sektor riil di dalam negeri, yang kini menghadapi gempuran persaingan yang semakin ketat baik di pasar domestik maupun internasional (www.Depfan.go.id). Para pengusaha cemas bila pemerintah tidak segera membuat kebijakan menyeluruh yang mampu mendukung sektor riil sehingga para investor asing akan semakin menjauh dari Indonesia, padahal Indonesia butuh investasi baik investasi baru maupun tambahan untuk meningkatkan ekspor. Ia mencontohkan Jepang sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia saja cenderung menurunkan investasinya di Indonesia. Pada 2003 investasi Jepang di Indonesia mencapai sekitar 73 juta yen dan turun pada 2004 menjadi 33 juta yen. Sedangkan di Thailand investasinya meningkat dari sekitar 71 juta yen pada 2003 menjadi sekitar 120 juta yen pada 2004. Demikian pula di Cina, investasi Jepang di negara itu tumbuh dari sekitar 335 juta yen pada 2003 menjadi sekitar 490 juta yen pada 2004. Angka penurunan investasi (Jepang di Indonesia) sangat memprihatinkan. Thailand (investasi Jepang) tumbuh, kita turun. Ini sinyal buruk, sekarang terserah pemerintah mau bagaimana menyikapi ini. Sementara itu, salah satu perwakilan investor asing, Direktur Pemasaran PT Samsung Electronics Indonesia (SEI) Lee Kang Hyun mengatakan kecemasannya terhadap iklim investasi

dan industri (manufaktur) di Indonesia yang dinilainya tidak memiliki gambaran jangka panjang yang jelas. "Pemerintah nampaknya belum siapkan apa-apa. Pemerintah belum beri gambaran jangka panjang yang jelas yang bisa dijadikan acuan investor. Kalau tidak ada itu, kami tidak punya harapan," ujar Lee yang juga menjadi salah satu Ketua Gabungan Elektronik Indonesia (Gabel).

Menurut Sri Hartati Samhadi (Kompas 25 Agustus, 2007), banyak kalangan di masyarakat yang menggantungkan harapan besar dari ditandatanganinya Kesepakatan Kemitraan Ekonomi, EPA, antara Indonesia dan Jepang. EPA dianggap bukan sekadar barometer membaiknya hubungan Indonesia-Jepang, tetapi *magical deal* yang akan bisa mengatasi banyak persoalan yang dihadapi perekonomian Indonesia. Kendati mendukung penandatanganan EPA, banyak pengamat dan pelaku usaha mengaku skeptis Indonesia bisa memetik manfaat maksimal dari EPA. Namun, beberapa yang lain melihat EPA sebagai satu-satunya harapan Indonesia saat ini untuk bisa mengatasi ketertinggalan dari negara lain dalam memanfaatkan momentum globalisasi proses produksi dan persaingan pasar global. Mereka melihat EPA sebagai peluang dan tantangan. Jika disimak, keskeptisan yang muncul sekarang ini memang lebih banyak dilandasi oleh ketidakpercayaan akan kesiapan Indonesia untuk mengambil peluang yang terbuka dari kesepakatan ini. Mereka yang pesimistis bahkan melihat Indonesia ada di pihak yang akan dirugikan. Dampak dari EPA memang masih sangat sulit diprediksi. Secara umum, dari pengalaman EPA Jepang dengan tujuh negara lain sebelumnya, menurut Kementerian Urusan Luar Negeri Jepang, investasi memang meningkat beberapa waktu setelah perjanjian efektif. Banyak iming-iming manfaat yang juga dijanjikan oleh EPA. Di antaranya, seperti diungkapkan Departemen Perdagangan RI, adalah meningkatnya akses pasar ke Jepang, meningkatnya investasi Jepang di Indonesia, dan meningkatnya daya saing. Selain itu, meningkatnya daya beli masyarakat karena meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja, berkembangnya industri pendukung, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya EPA, ekspor ke Jepang diperkirakan meningkat 20 persen, dan investasi Jepang di Indonesia meningkat dua kali lipat, dari 11 miliar dollar US menjadi 20 miliar dollar US. Dengan adanya penghapusan

sebagian besar hambatan tarif di kedua belah pihak, secara teoritis di atas kertas EPA diharapkan memang bisa mendongkrak ekspor Indonesia (terutama nonmigas) ke Jepang, dan memulihkan kembali investasi Jepang di Indonesia. Namun, situasi riil yang ada membuat sejumlah pengamat sangsi Indonesia bisa mendapat manfaat maksimal. Ekonom INDEF yang juga anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo, dan peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Arianto Patunru menyebutkan beberapa alasan mengapa ia merasa skeptis. **Pertama**, ketidaksiapan industri dalam negeri. Ia melihat kebijakan industri sejak tahun 2000 dapat dikatakan hanya tamal sulam. Tidak ada implementasi kebijakan yang fokus dan komprehensif mengenai industri mana yang akan didorong, seberapa cepat dia didorong, prasarana dan fasilitas apa yang akan diberikan, keterkaitan industri apa yang akan dibangun atau daerah mana yang akan dijadikan basis industri apa. Kebijakan industri yang ada hanya bersifat responsif. Para menteri hanya membuat kebijakan berdasarkan surat permohonan dari pelaku industri tertentu, sebagaimana halnya dengan insentif perpajakan. "Tidak ada *strong directive* dari pemerintah bahwa yang mau dibangun industri ini, *linkage*-nya ke sektor A dan B, tetapi insentifnya ke X, dan seterusnya. Akibatnya, pelaku usaha lari ngalor-ngidul. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana bisa memanfaatkan peluang EPA? China, India, dan Vietnam malah lebih siap masuk ke Jepang," ujarnya. **Kedua**, ia melihat banyak sekali langkah ad hoc dari berbagai instansi yang justru merusak investasi dan industri. Misalnya, pemekaran wilayah yang berlebihan yang justru memperpanjang rantai perizinan dan ekonomi biaya tinggi. **Ketiga**, implementasi kebijakan di lapangan sendiri sering tidak efektif. "Tidak ada kepemimpinan yang kuat dan fokus untuk *get things done*. Yang ada hanya teori, wacana, dan kertas kerja. Realitas di lapangan bisa beda 180 derajat," kata Dradjad. Ia mencontohkan, bagaimana investasi Jepang bisa digenjut kalau pembebasan lahan selalu bermasalah dan Pelabuhan Tanjung Priok justru semakin menjadi sarang mafia, kendati sudah dilakukan reformasi kepabeanan. EPA sendiri dinilai tidak menyentuh masalah utama yang menghambat ekspor Indonesia ke Jepang, yaitu hambatan nontarif. Jepang, seperti negara maju lain, masih menggunakan hambatan nontarif yang dibungkus

dalam isu-isu seperti standar kesehatan, standar keamanan, standar kelestarian, standar hak asasi manusia, dan standar perburuhan untuk menghambat masuknya produk negara lain. Ini yang tidak disentuh dalam kesepakatan itu, kendati melalui program *capacity building* yang menjadi pilar ketiga EPA, Jepang menjanjikan membantu Indonesia memperbaiki kapasitas agar mampu memenuhi standar-standar atau sertifikasi tersebut. Arianto Patunru berpendapat Indonesia perlu berhati-hati dengan perjanjian-perjanjian yang bersifat bilateral seperti ini karena kerja sama semacam itu bisa mengakibatkan apa yang dikenal sebagai *spaghetti-bowl effect*, yaitu munculnya aturan-aturan yang karut-marut yang bisa bertentangan satu dengan yang lain. Jika itu terjadi, maka bukan perdagangan yang terjadi, tetapi pembelokan perdagangan (*trade diversion*). "Memang WTO lagi mandek dan liberalisasi unilateral sedang terhambat sentimen proteksionisme, tetapi terlalu larut dalam perjanjian bilateral bisa menjadi bom waktu," ujarnya.

Ekonom dari *Centre for Strategic and International Studies* Hadi Soesastro mengatakan, EPA harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari kerangka hubungan kedua negara dan juga dari apa yang bisa dimanfaatkan dari perjanjian ini. Semua ini memang tidak akan seketika memberikan hasil. Akan menguntungkan atau tidak, tergantung pada Indonesia sendiri karena dalam banyak hal persoalan memang lebih ada pada Indonesia sendiri. Contohnya, buruknya iklim investasi yang membuat ekspansi investasi dan peningkatan daya saing manufaktur tidak terjadi selama ini. Hadi berpendapat bahwa meski ada unsur liberalisasi perdagangan, tujuan utama EPA adalah untuk menarik dan melanggengkan investasi Jepang di Indonesia. Ini penting bagi Indonesia karena selama 10 tahun sejak krisis, perusahaan-perusahaan Jepang sebagai investor terbesar di Indonesia tidak melakukan lagi ekspansi investasi di sini. Akibatnya, Indonesia mulai "ketinggalan kereta", terutama di bidang di mana seharusnya Indonesia bisa memperoleh tempat lebih besar dalam jejaring produksi regional atau globalisasi proses produksi.

Studi yang dilakukan Prema-chandra Athukorala dari Australian National University, menunjukkan Indonesia tidak masuk dalam jaringan produksi regional atau global. Semakin lama Indonesia tertinggal akan semakin tak mendapatkan

tempat karena peran diambil seluruhnya oleh negara lain. Pada permulaan dekade 1990-an, sebenarnya Indonesia sudah mulai masuk ke dalam jejaring produksi regional ini. China sendiri bahkan belum masuk pada saat itu karena negara ini tidak mau berada di bawah bayang-bayang Jepang. Akan tetapi, dalam 10 tahun terakhir, semakin banyak komponen dan suku cadang produk manufaktur Asia dan global yang disuplai China. Adapun porsi Indonesia dalam memasok komponen atau suku cadang elektronik maupun otomotif untuk produksi Asia justru semakin menyusut karena menyusutnya investasi asing di Indonesia. Tahun 2003-2004, sumbangan ekspor komponen terhadap total ekspor Indonesia hanya 9,1 persen. Sebagai perbandingan, sumbangan ekspor komponen Malaysia terhadap total ekspor negara itu 36,3 persen. Untuk Filipina angkanya 59,6 persen, Singapura 45,2 persen, dan Thailand 20,5 persen. Selama periode 2001-2004, ekspor komponen dan suku cadang Indonesia hanya tumbuh 2,3 persen per tahun, di bawah rata-rata negara Asia yang sebesar 5,2 persen. Produk primer seperti makanan, minuman, tembakau, produk mentah pertanian dan produk mineral, menurut Athukorala, terus mendominasi ekspor nonmigas Indonesia. Untuk produk manufaktur seperti *consumer electronics*, Indonesia juga sangat tertinggal dibandingkan Malaysia dan Thailand. Di produk-produk padat karya tradisional (terutama alas kaki, barang-barang untuk perlengkapan perjalanan atau olahraga) Indonesia juga tidak menunjukkan keunggulan dibandingkan dua negara tersebut. Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar sepertiga dari perusahaan manufaktur yang tercatat di Indonesia tahun 1994 sudah gulung tikar dalam kurun tiga tahun setelah krisis. Jumlah perusahaan baru yang muncul atau masuk tidak mampu mengimbangi jumlah yang ditutup. Satu-satunya harapan bagi Indonesia untuk memulihkan investasi manufaktur, menurut Hadi, hanya ada pada investor Jepang atau Korsel. Dari dua negara ini, Jepanglah yang lebih besar, lebih lama, dan lebih banyak menanamkan investasi di sini. Meski terjadi berbagai gejolak di Indonesia, investor Jepang tetap bertahan. Yang menjadi persoalan, mereka juga tidak melakukan ekspansi. EPA, menurut Hadi, menjadi semacam payung perjanjian yang diharapkan bisa membuat investor seperti Jepang merasa lebih tenteram menanamkan investasi di Indonesia.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri, di Jakarta mengatakan "Tahun depan pertumbuhan industri manufaktur akan tetap melambat atau tumbuh datar bila tidak ada perbaikan kebijakan. Tahun depan harus dimanfaatkan untuk momentum konsolidasi kebijakan pemerintah mendukung sektor tersebut, bila tidak ingin industri dan investasi mati secara perlahan." Ia menilai sampai sekarang masih banyak distorsi kebijakan pemerintah yang membuat kinerja industri cenderung menurun, seperti tidak harmonisnya tarif dimana bea masuk (BM) bahan baku lebih rendah dibanding produk jadi, kebijakan perpajakan yang tidak kondusif sehingga ada pajak berganda pada proses produksi. Ia mengharapkan pemerintah khususnya tim ekonomi membuat kebijakan makro yang tidak hanya untuk stabilitas makro ekonomi saja, tetapi juga kebijakan ekonomi yang berbasis sektor riil.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan mengatakan kalangan industri menunggu langkah pemerintah untuk membuat kebijakan yang menyeluruh dalam rangka pengembangan industri tahun 2006-2010. "Sektor riil, khususnya industri, sudah bersiap diri dengan asumsi angka masing-masing untuk 2006 sampai 2010. Harapan kita bagaimana pemerintah bisa mendukung dan mewujudkan target tersebut," ujarnya (www.Dephan.go.id). Ia memberikan contoh bahwa pada 2010 industri elektronik nasional menargetkan ekspor meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun ini menjadi 15 miliar dolar US. Demikian pula industri tekstil dan produk tekstil (TPT), menargetkan ekspor TPT 2010 naik menjadi 14 miliar dolar US. Sedangkan Ketua Umum Gaikindo Bambang Trisulo menargetkan penjualan mobil pada 2010 bisa mencapai 750 ribu unit sampai 800 ribu unit dan Ketua AISI Ridwan Gunawan memperkirakan penjualan sepeda motor juga meningkat, bahkan Indonesia bisa mengekspor produk sepeda motor bebek yang kini menjadi basis produksi prinsipal Jepang.

IV. PENUTUP

Pada saat ini memang terdapat indikasi perbaikan. Permintaan terhadap produk manufaktur dari dalam negeri, misalnya, telah nampak pulih seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang perlu diwaspadai adalah permintaan untuk

ekspor manufaktur. Pertumbuhan ekspor manufaktur ke depan harus tidak lagi sekedar mengandalkan upah buruh murah. Untuk itu, satu strategi ekspor yang terkait dengan industrialisasi harus segera dikembangkan. Demikian pula, terdapat indikasi kuat adanya perbaikan tingkat pertumbuhan modal dan penyaluran kredit ke sektor manufaktur. Selain itu, pemerintah saat ini tengah berupaya memperbaiki kelemahan aturan pesangon dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tersendiri untuk merevisi masalah ini. Diharapkan PP ini bisa menghilangkan kendala yang dirasakan perusahaan untuk menambah pekerja.

Pada saat ini Indonesia membutuhkan banyak investasi pada sektor manufaktur, otomotif dan elektronik. Pada waktu lalu Wapres Jusuf Kalla mengadakan kunjungan ke negara Jepang dan Korea Selatan yang kuat di bidang tersebut. Wapres Kalla mengatakan "Di investasi kita butuh banyak manufakturing. Umumnya Korea dan Jepang punya pengalaman dan teknologi kuat di bidang ini." Dalam kesempatan dialog dengan para pengusaha manufaktur di Seoul, Wapres memaparkan berbagai kondisi akhir dan menarik di Indonesia untuk berinvestasi.

Jepang merencanakan mengalihkan investasinya dari China ke Indonesia dan negara lainnya di kawasan ASEAN karena negara tirai bambu itu dinilai sudah mulai jenuh dan diprediksi tidak nyaman lagi pada tahun-tahun mendatang. Hirota Nakanishi, ketua delegasi pengusaha Jepang, mengatakan investasi negaranya ke China dikurangi dan dialihkan ke Indonesia serta negara lainnya di Asia Tenggara yang dinilai lebih menarik. Rencana investasi akan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing negara. Khusus Indonesia memungkinkan investasi mengarah ke sektor manufaktur, agribisnis, dan sebagainya. 'Di Jateng, sektor otomotif, furniture, dan pertambangan menjadi perhatian utama kami,' jelasnya. Selama ini, kata dia, investasi Jepang sebagian besar mengalir ke China sejak negara tersebut mengalami pertumbuhan industri begitu pesat dan menjadi incaran sejumlah negara maju. Namun akhir-akhir ini, menurut dia, pembangunan industri di China mulai terlihat jenuh dan bakal tidak nyaman setelah pemerintah tidak lagi memberi banyak kemudahan bagi investor asing. 'Kondisinya jauh berbeda dibandingkan dengan dua tahun lalu yang sangat baik untuk investasi,' tambahnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia menginginkan Jepang memperbesar kegiatan investasinya di bidang manufaktur sehingga dapat membuka lapangan kerja baru sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kita berharap Jepang memahami aspirasi kita untuk memperbesar investasi di bidang manufaktur," kata Wapres usai bertemu dengan sejumlah pengusaha Jepang di Tokyo. Jusuf Kalla mengemukakan hal itu berkaitan pola hubungan kerjasama ekonomi kedua negara agar bisa dilandasi pemahaman Indonesia mengenai aspirasi Jepang, dan pada saat yang sama meminta agar negara Matahari Terbit itu pun dapat memahami aspirasi Indonesia. "Yang saya minta dari (kerjasama ekonomi, red) dengan Jepang adalah timbal balik. Oke, kita penuhi aspirasi Jepang, tetapi aspirasi kita juga, yaitu memperbesar kapasitas investasi di bidang manufaktur," ujarnya (AntaraNews, 2007).

Menurut Hanun (Ekonomi dan Bisnis, 2008), Departemen Perindustrian (Depperin) akan tetap merealisasikan sejumlah investasi di sejumlah sektor manufaktur, meskipun Departemen Keuangan (Depkeu) telah menurunkan target investasi untuk tahun ini. Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dan baja merupakan salah satu industri strategis yang tetap dipertahankan pertumbuhan investasinya. Target investasi diturunkan dari 15,5% menjadi 12,3%, setelah direvisinya target pertumbuhan ekonomi 2008 dari 6,8% menjadi 6,4%. Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Depperin Ansari Bukhari menilai, revisi angka tersebut pasti sudah mempertimbangkan potensi pertumbuhan semua sektor. "Perhitungan penurunan itu kan yang pasti sudah memperhitungkan semua sektor termasuk TPT, alas kaki, dan sebagainya. Kita dapat lihat bahwa investasi 2008 tidak akan jauh berbeda dengan investasi 2007," tuturnya. Berdasarkan catatan *Media Indonesia* industri logam, mesin dan elektronika merupakan salah satu cabang industri manufaktur yang mengumpulkan investasi cukup besar, mencapai Rp. 3,54 triliun yang tersebar dalam 17 Izin Usaha Tetap (IUT) berkategori PMDN. Cabang industri yang berada pada nomor teratas adalah industri kertas dan percetakan dengan nilai investasi Rp. 14,55 triliun yang dimiliki oleh 8 IUT. Sedangkan untuk investasi berkategori Penanaman Modal Asing (PMA), pencapaian terbesar terlihat dalam

cabang industri kimia dan farmasi dengan nilai Rp. 1,6 triliun untuk 32 IUT. Padahal, nilai investasi tahun sebelumnya hanya Rp. 264,6 miliar dengan jumlah IUT yang sama. Ansari mengatakan, pihaknya tetap akan merealisasikan sejumlah komitmen investasi di industri baja dan TPT, yang dilakukan oleh sektor swasta. "Yang jelas komitmen realisasi investasi yang sudah diteken, tetap akan dilaksanakan. Sebagian besar kan dari swasta." cetusnya.

Menurut Astéria (Ekonomi/Investasi, 2008), investasi triwulan I 2008 mengalami peningkatan yang cukup pesat, karena ditunjang penanaman modal asing. Indonesia masih dianggap tujuan investasi di tengah masa suram perekonomian global. Namun mampukah peluang ini dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor riil? Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi, penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Indonesia pada triwulan I 2008 mengalami kenaikan 80% dibanding periode yang sama tahun lalu. "Realisasi investasi triwulan satu masih sangat sehat. Pertumbuhan sampai 80% untuk domestik dan asing," ujar Lutfi. Peningkatan investasi ini, ditunjang sektor telekomunikasi sebagai pendorong utama, kemudian sektor *pulp and paper*. Bila total realisasi PMA dan PMDN Januari-Maret 2007 sebesar Rp. 40,59 triliun, maka naiknya investasi kuartal I 2008 sebesar 80% kurang lebih menjadi sekitar Rp. 73,06 triliun. Pada 2007, realisasi PMA kuartal I tercatat US\$ 2,99 miliar (Rp. 26,91 triliun), meningkat 15% dibanding realisasi periode yang sama 2006 sebesar US\$ 2,6 miliar. Sementara realisasi PMDN naik 60,56% mencapai Rp. 13,68 triliun dibanding 2006 di level Rp. 8,52 triliun. Saat itu, realisasi PMA yang paling besar adalah di industri kimia dan farmasi, industri kertas, barang dari kertas dan percetakan, kemudian pertambangan, industri makanan dan konstruksi. Sedangkan realisasi PMDN terbanyak terdapat di sektor industri kertas dan percetakan, industri logam, mesin dan elektronika, industri makanan, tanaman pangan dan perkebunan serta konstruksi. Adapun realisasi investasi selama 2007 adalah Rp. 127,93 triliun atau naik 71,69% dibandingkan periode yang sama 2006. Komposisinya masih lebih besar asing, di mana Rp. 34,87 triliun merupakan investasi PMDN sedangkan investasi PMA mencapai Rp. 93,06 triliun.

Pencapaian realisasi investasi itu merupakan hasil dari upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi, antara lain dengan menerbitkan UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU tersebut, pemerintah mengatur pemberian insentif fiskal, pengaturan koordinasi yang lebih jelas antara pusat dan daerah, dilaksanakannya sistem pelayanan terpadu satu pintu, dan sistem perizinan *online*.

Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mencurigai penanaman modal yang dilakukan kalangan investor asing lebih banyak dilakukan pada sektor minyak bumi, gas, dan pertambangan (*natural resources*). Sementara penanaman modal di sektor manufaktur tidak terlalu signifikan. "Sektor jasa dan keuangan juga tampaknya tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikannya penanaman modal di sektor manufaktur tentu mengecewakan kita, sebab ini yang efeknya lebih baik dalam penyerapan kita punya angka pengangguran," ujarnya.

Bank Dunia dalam laporannya menyebutkan bahwa nilai investasi Indonesia pada 2007 mencapai 24,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang berarti menunjukkan kemajuan dan perbaikan persepsi bisnis di Indonesia. "Peningkatan investasi sebagai akibat dari upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi. Mudah-mudahan peningkatan ini juga mencerminkan awal dari pembalikan arah dalam persepsi investor global, terutama dari Jepang," kata Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia William E Wallace.

Bapak dan Ibu yang terhormat, dari informasi terakhir dapat dikatakan bahwa investasi di sektor manufaktur masih tertinggal. Kelihatannya bahwa kebijakan pemerintah di bidang manufaktur masih jauh dari apa yang diharapkan oleh investor asing dan dalam negeri. Kebijakan itu hanya dapat dibuat dan diturunkan dari pemerintah, artinya hal-hal tersebut diluar jangkauan kita sebagai akademisi. Mungkin yang dapat kita lakukan saat ini adalah mengelus dada kita, berdoa dan berharap agar pemerintah dengan aparatnya dapat menciptakan alam investasi yang kondusif dengan membuat peraturan-peraturan yang dapat menarik investor asing atau dalam negeri. Marilah kita mendidik anak didik kita (mahasiswa/i) dengan baik agar menjadi manusia yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- AntaraNews (2007), "Indonesia Ingin Jepang Perbesar Investasi Manufaktur."
- Asteria, "Meneropong Investasi Triwulan I" *Ekonomi/Investasi*, 2008
- Dadan Kuswaraharja, "PMA & PMDN Hingga November Membre" *detikFinance*, 2006
- Departemen Keuangan RI-Dirjen Perbendaharaan "Jepang Alihkan Investasi ke Indonesia," *Suara Merdeka*
- Dismal Science Indonesia dan Fantasy (D.S.I.F), "Manufaktur Kunci Pergerakan Sektor Riil", 2007
- Hanun, "Investasi Sektor Strategis Tetap Dipertahankan" *Ekonomi & Bisnis*, 2008.
- Jusuf Waluyo Jati, "Lima Sektor Tumbuh tak Optimal, Investasi Manufaktur 2008 Bakal Melambat" *Bisnis Indonesia*, 2007
- Jusuf Waluyo Jati, "Iklim Bisnis dan Investasi Manufaktur Semakin Tidak Pasti" *Bisnis Indonesia*, 2008
- LPEM FEUI, "Ringkasan Eksekutif: Pemantauan Iklim Investasi di Indonesia, Laporan dari Survey Pertengahan Mei 2005.
- Seputar Indonesia, "Timbulkan Ketidakpastian"-Kadin, 2008
- Sri Hartati Samhadi, "Menggantungkan Harapan pada EPA" *Kompas* 25 Agustus 2007
- Stern, N.H (2002), *A strategy for Development*, Washington, D.C: World Bank
- Economic and research development, Development indicators and policy research division "Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia"
- Tulus Tambunan (2006), "Iklim investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi" *Kadin-Indonesia – Jetro*
- WEF (2004), *Global Competitiveness Report 2004-2005*.
- WEF (2004), *Global Competitiveness Report 2005-2006*.
- WWW. Dephan.go.id, "Tanpa Konsolidasi Kebijakan Pertumbuhan Industri Manufaktur Mencemaskan"

CURRICULUM VITAE

Nama : Y M Kinley Ph.D
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi / 20 Juni 1957
Alamat : Jl. Dago Pojok 59/161B
Bandung

Riwayat Pendidikan :

SD tamat tahun 1972
SMP tamat tahun 1974
SMA tamat tahun 1976
SI Jurusan Fisika Instrumentasi Nuklir – Universitas Indonesia Tamat tahun 1982
SII Jurusan Teknik Industri – Institut Teknologi Bandung Tamat tahun 1988
SIII - industrial Engineering – New Mexico State University – USA Tamat tahun 1996

Riwayat Pekerjaan

1. Dari tahun 1988 – 2004 sebagai pegawai negeri sipil pada Badan Tenaga Nuklir Indonesia dengan jabatan yang pernah dipegang adalah:
 - a. Kepala proyek
 - b. Kepala Sub Bidang Operasi Reaktor
 - c. DII
2. Mengikuti training baik di dalam negeri atau di luar negeri
3. Pada tahun 2004 menjadi tenaga pengajar pada Fakultas Teknologi Industri – UNPAR.
4. Tahun 2004 menjadi ketua tim pembentukan program SII Teknik Industri - UNPAR

Penghargaan yang pernah diterima :

1. Alpha Phi Mu , bagi mahasiswa yang memiliki IP > 3,75
2. Dosen pengajar terbaik untuk program Pasca Sarjana – UPH.

Karya Ilmiah :

1. Y M Kinley A, Daniel Siswanto, Yonge., "Development of Algorithm for Modification of 2-Neighborhood Local Optimization to Improve Traveling Salesman Problem's Solution", Proceeding APIEMS, Bangkok - Thailand
2. Y M Kinley A, Yogi Yusuf, Yuliana Wibisono., "Usaha Penurunan Persentase Cacat Ring Piston Tipe 4JA1 Pada Proses Habanakashi Mesin Besly", Jurnal Teknologi Industri – Universitas Kristen PETRA.



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141

Telp./Fax. : (022) 2032700

Homepage : <http://www.unpar.ac.id> , email : fti@home.unpar.ac.id